

## TAJUK RENCANA

### Urgensi Tes Swab Massal

DIY sepertinya belum bisa segera menerapkan fase kenormalan baru dalam waktu dekat ini, mengingat masih terus terjadi penambahan jumlah pasien positif Covid-19. Bahkan, melihat perkembangan mutakhir, yakni dengan munculnya klaster baru pedanggang ikan, memaksa kita untuk lebih berhati-hati.

Penambahan jumlah pasien positif Covid-19 boleh jadi karena makin meluasnya instrumen untuk melakukan pengetesan, baik melalui rapid test maupun swab. Di sejumlah pasar tradisional. Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah melakukan rapid test untuk mengetahui sejauh mana persebaran virus korona. Seperti rapid test yang digelar di Pasar Kranggan, menyusul ditemukannya pedagang ikan yang positif Covid-19, bisa dijadikan instrumen untuk melacak persebaran virus tersebut.

Namun, upaya ini tentu belum maksimal, karena sangat sulit untuk melakukan tracing secara komprehensif terhadap orang-orang yang berpotensi menyebarkan Covid-19. Terlebih bila transmisi itu terjadi pada orang tanpa gejala (OTG), yang secara fisik dan klinis nampak sehat, padahal yang bersangkutan pembawa virus.

Dalam kaitan itu, permintaan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY untuk melakukan tes swab secara massal sangat realistis (KR, 16/6). Mengapa? Karena melalui tes tersebut setidaknya memberi gambaran yang lebih pasti sejauh mana persebaran Covid-19 di DIY. Namun demikian, tes massal ini akan efektif bila metode yang digunakan tepat. Artinya, sampel yang dipilih untuk melakukan tes swab massal harus benar-benar representatif.

Untuk itulah, bila memang akan di-

adakan tes swab massal, maka harus melibatkan dunia perguruan tinggi atau masyarakat akademik, sehingga hitung-hitungannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, termasuk pilihan sampel, metode statistik yang digunakan dan sebagainya.

Banyak pihak tentu menginginkan segera diberlakukan kenormalan baru di DIY, meski dengan protokol yang cukup ketat. Tapi, hemat kita, jangankan terburu-buru mencapai fase itu sebelum dilakukan studi atau survei yang komprehensif. Survei yang kita maksudkan bukan sekadar mengukur sejauh mana persepsi masyarakat terhadap era kenormalan baru. Pun bukan soal setuju atau tidak setuju diberlakukannya kenormalan baru, melainkan lebih dari itu, yakni melihat secara riil kondisi persebaran Covid-19 di DIY, serta sejauh mana ketaatan masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Dalam konteks itulah permintaan Wakil Ketua DPR DIY untuk melakukan swab massal menemukan relevansinya. Sebab, hasilnya bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan kapan DIY bisa memasuki era kenormalan baru. Tanpa pertimbangan tersebut, dan kemudian memaksakan diri menerapkan kenormalan baru, maka bisa diibaratkan menyimpan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak.

Memang, untuk melakukan swab massal dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, karena itu harus dipertimbangkan sumber pendanaannya. Namun, hemat kita, demi kepentingan yang lebih besar, yakni keselamatan manusia, khususnya masyarakat DIY, penganggaran untuk swab massal harus diprioritaskan dibanding pos anggaran lainnya. □

# Jalan Tengah RUU HIP

## Diasma S Swandaru

saatfundamentalnorm, pokok kaidah negara yang fundamental. Mengganti Pancasila sama saja membubarkan Negara Republik Indonesia yang merdeka pada 17 Agustus 1945 (Notonagoro, 1959).

Sebagai norma dasar tertinggi, Pancasila tidak bisa diubah dengan cara dan jalan apapun, termasuk oleh MPR/ DPR/ Presiden terpilih sekalipun tidak berhak mengganti Pancasila Dasar Negara.



KR-JOKO SANTOSO

SAAT penulis mengisi Webinar Pancasila beberapa hari lalu, ada peserta yang menanyakan apakah ada jaminan bahwa Pancasila akan tetap ada di tengah adanya RUU HIP, Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila?

Pertanyaan ini menyeruak seiring beredarnya Naskah Akademik, Rapat Dengar Pendapat DPR, dan RUU HIP di sosial media dan mendapat respons dari berbagai masyarakat, termasuk juga tokoh politik maupun tokoh agama. Pernyataan dan perdebatan telah membawa kebingungan, masyarakat terseret derasnya arus perdebatan RUU HIP. Kemudian muncul suatu kekhawatiran akan munculnya komunisme, sekulerisme, ateisme, dan ketidaksetujuan pemerasan Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila yang ditafsirkan Ekasila (gotong royong) menghilangkan ketuhanan?

### Norma Dasar

Diskursus ini telah memberikan gambaran kepada kita bahwa keterlibatan publik sangatlah penting dalam perumusan peraturan undang-undangan. DPR maupun Pemerintah tidak bisa serta merta memutuskan kepentingan publik secara sepihak, sambil menutup mata atas realitas yang berkembang di masyarakat. Sebuah kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat partisipasi publik turut ambil bagian dalam mengontrol dan mengawasi produk-produk legislasi maupun regulasi.

Pancasila adalah ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila lahir menjawab pertanyaan Ketua Sidang BPUPK, Dr Radjiman Wedyodiningrat : apa dasar Indonesia merdeka? Meskipun saat bersidang kala itu, para pendiri bangsa tidak pernah tahu kapan Indonesia akan merdeka, tetapi dasar negara yang akan didirikan telah dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian, dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan terbentuknya UUD 1945 yang merupakan pencerminan Pancasila maka kedudukan Pancasila sangatlah kuat,

Karena keberadaan mereka adalah produk penerjemahan Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh yang kemudian termanifestasi dalam UU Pemilu. Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum, semua produk peraturan dan penyelenggaraan bernegara haruslah berpedoman pada Pancasila.

Pada 1 Juni 1945, pidato Ir Sukarno adalah orang yang menjelaskan *Philosophische Grondslag* Indonesia merdeka tentang lima dasar-dasar negara yang dinamai Pancasila. "Diatas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara tidak suka akan bilangan lima itu? Saya boleh peras, sehingga

tinggal 3 saja socio nasionalisme (perike-manusiaan dan kebangsaan), socio demokrasi (demokrasi dan kesejahteraan), dan ketuhanan. Tetapi jika barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Tri sila ini dan minta satu dasar saja? Maka dapatlah saya perkataan 'Gotong Royong'. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong!'"

### Jangan Mempertaruhkan

Saat mendengar penjelasan ini peserta sidang BPUPK bertepuk tangan riuh rendah. Perwujudan paling konkret dari semangat ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu dalam pergaulan sehari-hari tercermin dalam praktik gotong royong. Bukan berarti bahwa dengan diperas menjadi gotong royong maka sila-sila lainnya lenyap. Akan tetapi, kelima sila Pancasila itu harus dinafasi oleh semangat gotong royong (Yudi Latif, 2020).

Maka sudah selayaknya RUU HIP inisiatif DPR ini dalam pembahasan selanjutnya bersama Pemerintah janganlah mempertaruhkan sendi-sendiri persatuan bangsa. DPR dan Pemerintah perlu mengedepankan prinsip-prinsip dasar musyawarah untuk menggapai hikmah kebijaksanaan. Sehingga dapat menemukan titik temu dalam menjawab keresahan masyarakat. Dengan menambahkan konsideran tentang larangan ajaran komunisme/marxisme ataupun paham radikalisme/khilafahisme dan penghapusan pemerasan Pancasila. □

\*) **Diasma S Swandaru SH MH**,  
Kabid Advokasi Pusat Studi Pancasila  
UGM.

### Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opinikr@gmail dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih

## Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubum) 43-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email [pikiranpembaca@gmail.com](mailto:pikiranpembaca@gmail.com). Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

## Memilih Sekolah Lanjutan Terbaik

MEMUTUSKAN pilihan sekolah lanjutan terbaik bagi anak menjadi tugas berat, utamanya bagi para orangtua dalam memberikan pendampingan dan pengarahan putra-putrinya akan melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Banyak hal penting yang harus dipertimbangkan dan didiskusikan bersama agar anak tidak salah dalam memilih sekolah atau jurusan. Hal ini musti dilakukan, karena banyak sekolah ataupun jalur yang bisa dipilih sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 terkait Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Terhapusnya kastanisasi sekolah negeri sebagai dampak sistem zonasi, sejatinya sejalan dengan salah satu paradigma pendidikan bahwa 'pendidikan diperuntukkan untuk semua', tanpa pandang bulu seperti yang diamanatkan UUD 1945 (sebelum diamandemen) (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang.

Pada prinsipnya tak ada anak bodoh dan tidak bodoh, yang ada adalah anak yang berkesempatan dan tidak berkesempatan. PPDB online berbasis zonasi di tengah pandemi saat ini diharapkan banyak memberikan dampak positif sesuai kebutuhan, baik bagi sekolah, calon siswa maupun masyarakat.

Meskipun bebas dan leluasa dalam memilih, namun orangtua harus tetap cermat dan bijak dalam mendampingi dan mengarahkan putra-putrinya. Selain faktor kedekatan jarak tempuh, orangtua harus tetap mempertimbang-

kan bakat, minat dan kemampuan anak serta hal lain yang dapat mempengaruhi kesuksesan belajar anak.

Pertimbangan jarak tempuh akan memberikan rasa aman kepada para orangtua dan anak. Inilah salah satu nilai lebih dari sistem zonasi sebagai upaya mengurai kemacetan lalu lintas yang semakin hari semakin sulit dihindari. Banyaknya sekolah di perkotaan disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar yang selama ini banyak dikeluarkan.

Memilih sekolah yang mampu membekali anak dengan akhlak mulia, kemampuan berfikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, mandiri serta percaya diri adalah upaya para orangtua dalam menyiapkan karakter anak abad 21. Dengan demikian, kelengkapan sarana prasarana, kualitas dan kecukupan tenaga pendidik serta kondusifnya lingkungan belajar sekolah menjadi hal penting untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Kesalahan memilih sekolah atau jurusan hanya dikarenakan ambisi dan faktor pertemanan harus dihindari karena bisa berakibat fatal. Berdasarkan data dan fakta di lapangan, berbagai permasalahan pelajar salah satunya karena rendahnya motivasi belajar siswa berawal dari kesalahan memilih sekolah atau jurusan. Memastikan anak mendapatkan pendidikan lanjutan terbaik adalah salah satu bentuk kasih sayang orangtua terhadap anak dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. □

**Nuraila Mahmudah, Guru Matematika, SMKN 3 Yogya.**

## Mempersiapkan Jemaah Haji Lebih Maksimal

### Titik Nur Farikhah

gotu keluarga yang ditunjuk.

Sebelum diterbitkannya KMA Nomor 494, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah tetap berupaya melaksanakan bimbingan manasik sepanjang tahun melalui aplikasi online, CD/DVD, buku panduan dan media cetak serta elektronik. Disamping itu juga menyiapkan 20 serial video manasik haji online yang bertujuan sebagai bahan pembelajaran pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam, khususnya calon jemaah haji Indonesia yang dapat dilihat pada Channel Youtube Kementerian Agama RI.

Bimbingan manasik daring dipandang sangat efektif diberikan kepada jemaah haji dalam situasi dan kondisi seperti saat ini. Disamping jemaah tetap bisa mengikuti manasik haji daring juga bisa melakukan dialog interaktif dalam forum tersebut. Menanyakan berbagai hal yang kurang dipahami atau saat terjadi perbedaan persepsi.

### Maksimal

Terkait pembatalan haji, terhitung hingga 9 Juni 2020 sudah ada 58 jemaah reguler yang mengajukan pengembalian setoran pelunasan biaya haji dari 14 provinsi termasuk DIY. Artinya persentase jemaah yang tidak mengambil setoran pelunasan jauh lebih tinggi dari pada jemaah yang mengambil setoran pelunasan.

Seyogianya jemaah yang masuk daftar keberangkatan haji 2020 tidak perlu menarik setoran pelu-

nasan (BPIH) kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Dengan begitu jemaah tidak lagi disibukkan pada urusan administratif akan tetapi bisa lebih fokus pada persiapan teknis pelaksanaan haji tahun 2021 mendatang.

Tentu ada hikmah di baliknya. Jemaah menjadi lebih maksimal dalam melakukan persiapan haji. Terlebih memperdalam materi manasik haji, menghafal doa-doa, termasuk persiapan fisik, dan mental. Setidaknya dengan menghadapi kondisi pandemi ini jemaah lebih tertata hatinya, lebih ikhlas dan sabar menerima takdirNya. Bukankah sesuatu yang buruk bagi manusia belum tentu buruk dalam pandangan Allah?

Mengingat haji adalah panggilan Allah. Tidak ada yang bisa memajukan atau memundurkan waktunya. Allah akan memanggil hambaNya yang Dia kehendaki. Allah akan memanggil di saat yang paling tepat. □

\*) **Titik Nur Farikhah, Pranata Humas Kementerian Agama DIY.**

## Pojok KR

Pasokan kebutuhan bahan pangan di DIY aman.

-- **Namun daya beli masyarakat menurun.**

Gugus tugas perlu melakukan tes swab massal.

-- **Meski biaya mahal, tetap diusahakan.**

UMKM terdampak Covid-19, perlu intervensi pemerintah.

-- **Tak cukup hanya wacana.**

*Berabe*

## Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerbit: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisijanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Baskoro Jati Prabowo SSoS.

**Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito Mpd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Susiwi, Dra Prabadari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafiis:** Joko Santoso SSoS, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatini.

**Pemimpin Perusahaan:** Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 565660. E-mail: [iklan@kr.co.id](mailto:iklan@kr.co.id), [iklankrkyk23@yahoo.com](mailto:iklankrkyk23@yahoo.com), [iklankrkyk13@gmail.com](mailto:iklankrkyk13@gmail.com).

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

**Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685

(Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan [www.krjogja.com](http://www.krjogja.com). **Alamat e-mail:** [naskahkr@gmail.com](mailto:naskahkr@gmail.com). **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

**Perwakilan dan Biro:** **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro : Isdiyanto Isman SIP. **Banyuwangi:** Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro : Dryanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprpto, SPd Kepala Biro : Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.